



Pengembangan Kebijakan Kelembagaan Pendidikan Islam di Indonesia: Analisis Literatur

Hesti Indah Sari¹, Fatiyyah Fitri², Amanda Kuslaina³, Calvin Apriando Ginting⁴, Juliani⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Correspondence Email: hestiindah61@gmail.com.

ABSTRAK

Pengembangan kebijakan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam merespons berbagai perubahan sosial, politik, dan kemajuan ilmu pengetahuan di era modern. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana penanaman nilai-nilai keislaman, tetapi juga dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan arus globalisasi, perkembangan teknologi, serta kebijakan pendidikan yang berlaku secara nasional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh arah serta perkembangan kebijakan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia melalui pendekatan kajian literatur. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan pemerintah, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan kelembagaan pendidikan Islam dipengaruhi oleh regulasi pemerintah, kebutuhan masyarakat, serta berbagai tantangan internal lembaga pendidikan Islam, termasuk kualitas pengelolaan, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem tata kelola kelembagaan. Selain itu, arah kebijakan kelembagaan pendidikan Islam saat ini lebih menekankan pada peningkatan mutu pendidikan, penguatan akuntabilitas, serta upaya integrasi nilai-nilai keislaman dengan sistem pendidikan nasional. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis bagi pembuat kebijakan, pengelola lembaga pendidikan Islam, dan peneliti dalam merancang kebijakan kelembagaan yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kajian Literatur, Kebijakan Pendidikan Islam, Kelembagaan Pendidikan, Pendidikan Islam, Pengembangan Kebijakan.

ABSTRACT

The development of institutional policies for Islamic education in Indonesia plays an important role in responding to various social and political changes as well as advances in science in the modern era. Islamic education not only functions as a means of instilling Islamic values, but is also required to adapt to the forces of globalization, technological developments, and nationally applicable education policies. This article aims to comprehensively examine the direction and development of institutional policies for Islamic education in Indonesia through a literature review approach. This study employs a library research method by analyzing various sources, such as books, scholarly journal articles, government regulations, and relevant policy documents. The findings indicate that institutional policies for Islamic education are influenced by government regulations, societal needs, and various internal challenges faced by Islamic educational institutions, including management quality, human resource competence, and institutional governance systems. Furthermore, the current direction of institutional policy for Islamic education emphasizes improving educational quality, strengthening accountability, and integrating Islamic values with the national education system. Through this study, it is expected

to provide both theoretical and practical benefits for policymakers, managers of Islamic educational institutions, and researchers in designing more responsive and sustainable institutional policies.

Keywords: Literature Review, Islamic Education Policy, Educational Institutions, Islamic Education, Policy Development.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional di Indonesia dan memiliki peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, serta kemampuan intelektual peserta didik. Lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan sekolah Islam tidak hanya berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai keislaman, tetapi juga berperan sebagai lembaga sosial yang turut mendukung pembangunan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pengembangan kebijakan kelembagaan pendidikan Islam menjadi hal yang sangat diperlukan agar lembaga-lembaga tersebut tetap relevan dan mampu bertahan di tengah perubahan zaman.

Perubahan kebijakan pendidikan nasional yang terus berlangsung menuntut lembaga pendidikan Islam untuk selalu menyesuaikan diri dengan berbagai aturan yang berlaku. Kebijakan pemerintah, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun kebijakan teknis lainnya, memiliki pengaruh terhadap sistem pengelolaan lembaga pendidikan Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Situasi ini menjadikan lembaga pendidikan Islam berada pada posisi yang penting sekaligus penuh tantangan, karena di satu sisi harus mempertahankan nilai dan identitas keislaman.

Selain kebijakan pemerintah, perkembangan sosial dan kemajuan teknologi juga membawa dampak besar terhadap pengelolaan pendidikan Islam. Arus globalisasi, pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran, serta tuntutan kompetensi abad ke-21 mendorong lembaga pendidikan Islam untuk terus melakukan pembaruan kebijakan. Tanpa adanya kebijakan kelembagaan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, lembaga pendidikan Islam berisiko mengalami keterlambatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan.

Di sisi lain, pengembangan kebijakan kelembagaan pendidikan Islam juga menghadapi berbagai kendala dari dalam lembaga itu sendiri. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain keterbatasan kualitas dan jumlah sumber daya manusia, pengelolaan lembaga yang belum optimal, serta sistem penjaminan mutu yang masih lemah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kelembagaan tidak cukup hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas institusi dan profesionalisme pengelola pendidikan Islam.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji kebijakan pendidikan Islam dari berbagai sudut pandang, seperti aspek kurikulum, pembiayaan, dan manajemen pendidikan. Namun, kajian yang secara khusus membahas pengembangan kebijakan kelembagaan pendidikan Islam melalui analisis literatur masih relatif sedikit. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih sistematis untuk mengidentifikasi arah kebijakan, kecenderungan yang berkembang, serta berbagai isu strategis dalam pengembangan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengembangan kebijakan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia melalui studi literatur. Diharapkan analisis ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai dinamika kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta peluang dalam memperkuat kelembagaan pendidikan Islam di masa mendatang. Dengan demikian, hasil kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, pengelola lembaga pendidikan Islam, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan kelembagaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji secara mendalam berbagai konsep, kebijakan, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan pengembangan kebijakan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia. Data penelitian bersumber dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku akademik, artikel jurnal nasional maupun internasional, dokumen kebijakan pemerintah, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan Islam (Assingkily, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka secara sistematis dengan menggunakan sejumlah kata kunci yang sesuai, antara lain kebijakan pendidikan Islam, kelembagaan pendidikan Islam, dan pengembangan kebijakan pendidikan. Literatur yang diperoleh kemudian disaring berdasarkan tingkat kesesuaian dengan topik penelitian, kebaruan informasi, serta kredibilitas sumber. Setelah itu, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk menemukan tema-tema penting, pola kebijakan, dan kecenderungan dalam pengembangan kelembagaan pendidikan Islam yang tercermin dalam berbagai sumber tersebut.

Tahap akhir penelitian ini adalah penyusunan kesimpulan secara deskriptif dan analitis berdasarkan hasil sintesis dari literatur yang telah dikaji. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai dinamika kebijakan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia, termasuk berbagai tantangan dan peluang yang ada. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang bersifat konseptual dan dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan kelembagaan pendidikan Islam yang lebih responsif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Regulasi Kebijakan Kelembagaan Pendidikan Islam

Kerangka regulasi kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum pendidikan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Melalui regulasi tersebut, lembaga pendidikan Islam memperoleh pengakuan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi, dengan tetap memenuhi standar pengelolaan yang telah ditetapkan negara. Pengakuan ini memberikan kedudukan legal bagi pesantren, madrasah, dan sekolah Islam dalam struktur pendidikan nasional. Berbagai kajian literatur juga menunjukkan bahwa dasar hukum ini berperan penting dalam membentuk standar

kelembagaan pendidikan Islam yang sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional.(Roqib, 2025)

Selain regulasi umum, pemerintah juga menerbitkan aturan khusus, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang bertujuan memperkuat posisi kelembagaan pesantren. Undang-undang ini tidak hanya mengakui pesantren secara hukum, tetapi juga memberikan peluang dukungan dalam bentuk pengembangan sumber daya, pembiayaan, serta keterlibatan pesantren dalam program pembangunan nasional. Keberadaan regulasi ini membantu pesantren untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan nasional tanpa harus kehilangan ciri khas dan tradisi pendidikan Islam yang telah lama berkembang.(Syadzily, 2025)

Regulasi pendidikan Islam juga diperkuat oleh berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait, terutama yang mengatur kurikulum dan standar pendidikan madrasah. Kebijakan kurikulum madrasah, misalnya, terus mengalami penyesuaian melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) yang diperbarui sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendidikan dan tuntutan kelembagaan modern. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi kelembagaan pendidikan Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial serta perkembangan zaman.

Dari perspektif historis, regulasi pendidikan Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang bertahap, mulai dari masa sebelum kemerdekaan, era Orde Lama dan Orde Baru, hingga periode Reformasi dan globalisasi. Perubahan kebijakan tersebut tidak terlepas dari dinamika politik dan sosial yang memengaruhi pandangan negara terhadap peran pendidikan Islam. Dalam konteks ini, regulasi pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan administrasi pendidikan, tetapi juga mencerminkan kepentingan politik dan budaya yang lebih luas.(Darwinsyah & Nugroho, 2021)

Salah satu persoalan utama dalam penerapan regulasi kelembagaan pendidikan Islam adalah penyelarasan antara kebijakan nasional dan praktik di tingkat daerah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah tersedia, pelaksanaannya sering menghadapi kendala, seperti ketidaksinkronan peraturan daerah, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kemampuan manajerial lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, perumusan kebijakan kelembagaan perlu mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan agar regulasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mudah diterapkan.(Bakar et al., 2024)

Perbedaan kondisi antara lembaga pendidikan Islam di wilayah maju dan tertinggal juga menjadi isu penting dalam kajian regulasi. Kebijakan kelembagaan yang ideal seharusnya mampu mendorong pemerataan akses dan kualitas pendidikan, termasuk penyediaan infrastruktur, peningkatan kompetensi pendidik, dan dukungan pembiayaan bagi lembaga di daerah yang kurang berkembang. Hal ini menuntut regulasi yang tidak hanya menetapkan standar minimum, tetapi juga mengakomodasi kebijakan afirmatif bagi lembaga yang memiliki keterbatasan.

Literatur terkini menegaskan bahwa kebijakan kelembagaan pendidikan Islam perlu menyesuaikan diri dengan tantangan global, perkembangan teknologi digital, serta tuntutan moderasi beragama. Regulasi harus mampu mendukung integrasi antara pendidikan agama dan umum, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta penguatan nilai-nilai moderat dan inklusif. Kerangka regulasi yang responsif terhadap perubahan tersebut akan mendorong pendidikan Islam tidak hanya bertahan

dalam sistem hukum nasional, tetapi juga berkembang sebagai institusi yang relevan secara sosial dan budaya di era modern.

Arah Pengembangan Kebijakan Kelembagaan Pendidikan Islam

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa kebijakan kelembagaan pendidikan Islam kini tidak lagi hanya menekankan pemenuhan aspek legal dan administratif. Arah kebijakan mengalami pergeseran menuju peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan akuntabilitas lembaga. Perhatian utama tidak hanya pada pengakuan formal, tetapi pada pengembangan sistem penjaminan mutu internal yang berjalan secara konsisten. Sistem ini mencakup pengelolaan lembaga, efektivitas proses pembelajaran, serta evaluasi berkelanjutan agar pendidikan tetap sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Pendekatan ini sejalan dengan tuntutan era Society 5.0 yang menuntut lembaga pendidikan lebih adaptif dan responsif. (Saimima & Banawi, 2023)

Pergeseran kebijakan tersebut menunjukkan bahwa mutu pendidikan dipandang sebagai fondasi utama dalam penguatan kelembagaan pendidikan Islam. Pemerintah dan pengelola lembaga semakin menempatkan sistem penjaminan mutu internal sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kinerja institusi. Kebijakan ini menekankan pentingnya peningkatan kompetensi pendidik, pembaruan kurikulum, serta penerapan manajemen berbasis data dan bukti dalam proses perencanaan maupun evaluasi pendidikan. (Indana et al., 2024)

Seiring dengan peningkatan mutu, aspek akuntabilitas kelembagaan juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan pendidikan Islam. Akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan administrasi, tetapi juga mencakup keterbukaan dalam perencanaan, pelaporan, dan penilaian kinerja lembaga. Hal ini semakin relevan di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya yang transparan dan bertanggung jawab. Berbagai studi menunjukkan bahwa tantangan akuntabilitas masih berkaitan dengan lemahnya komunikasi kebijakan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki lembaga. (Rusdiana, n.d.)

Selain itu, kebijakan kelembagaan pendidikan Islam juga mulai diarahkan pada penguatan daya saing di tingkat global. Dalam konteks globalisasi, lembaga pendidikan Islam dituntut memiliki standar mutu yang mampu bersaing secara internasional tanpa meninggalkan identitas keislaman. Upaya ini meliputi peningkatan kualitas lulusan, penguasaan bahasa asing, kemampuan teknologi informasi, serta wawasan lintas budaya. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada kemampuan lembaga untuk berinovasi dan menjalin kerja sama internasional.

Orientasi kebijakan berbasis mutu juga tercermin dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan standar nasional. Kurikulum yang adaptif mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kompetensi abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan literasi digital. Penguatan mutu pembelajaran ini menjadi strategi penting bagi lembaga pendidikan Islam untuk menghadapi persaingan global dan memastikan lulusan memiliki keseimbangan antara kompetensi spiritual dan keterampilan profesional. (Umam, 2021)

Kebijakan yang menitikberatkan pada mutu dan akuntabilitas juga mendorong penerapan manajemen strategis serta inovasi dalam pembelajaran dan pemanfaatan

teknologi pendidikan. Fokus kebijakan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi layanan pendidikan, serta peningkatan efektivitas proses pembelajaran. Perubahan paradigma ini menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan global tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam sebagai landasan pendidikan.

Secara umum, arah pengembangan kebijakan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia bergerak menuju profesionalisme, keterbukaan, dan kepekaan terhadap kebutuhan peserta didik serta masyarakat. Kebijakan tidak lagi terbatas pada pemenuhan aspek legal, tetapi diarahkan pada pembentukan sistem pendidikan Islam yang bermutu, akuntabel, dan relevan dengan perkembangan global. Dengan demikian, penguatan kelembagaan pendidikan Islam menjadi bagian penting dari transformasi pendidikan nasional yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Tantangan Internal dalam Implementasi Kebijakan Kelembagaan

Pelaksanaan kebijakan kelembagaan pendidikan Islam sering menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi jumlah maupun kualitas. Banyak lembaga pendidikan Islam masih kesulitan menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi profesional, khususnya dalam bidang manajemen dan pengelolaan lembaga. Kondisi ini berdampak pada efektivitas kebijakan karena SDM merupakan pelaksana utama yang mengubah aturan normatif menjadi praktik nyata. Berbagai penelitian menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM melalui program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mengatasi persoalan internal lembaga pendidikan Islam. (Aziz & Marlina, 2025)

Selain persoalan SDM, lemahnya manajemen kelembagaan juga menjadi hambatan yang sering ditemukan dalam implementasi kebijakan. Manajemen yang belum efektif terlihat dari perencanaan yang kurang terarah, pembagian tugas yang tidak jelas, serta minimnya evaluasi program. Akibatnya, kebijakan kelembagaan sering kali hanya berhenti pada tataran regulasi tanpa diikuti oleh perbaikan praktik pengelolaan. Literatur menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam perlu menerapkan prinsip manajemen modern, seperti perencanaan strategis, pengawasan berbasis data, dan evaluasi berkelanjutan agar tata kelola kelembagaan menjadi lebih efektif. (Fadilah et al., 2023)

Kepemimpinan pendidikan juga menjadi aspek penting yang masih belum optimal di banyak lembaga pendidikan Islam. Kepemimpinan yang kurang visioner, tidak adaptif terhadap perubahan, serta minim inovasi dapat melemahkan komitmen pelaksanaan kebijakan. Padahal, kepemimpinan yang efektif dibutuhkan untuk mengarahkan seluruh sumber daya lembaga secara terpadu dan menumbuhkan semangat kerja dalam mencapai visi dan misi kelembagaan. Sejumlah studi menyoroti tantangan kepemimpinan pendidikan Islam dalam menyesuaikan diri dengan era digital dan tuntutan transformasi pendidikan yang semakin kompleks.

Faktor lain yang turut menghambat implementasi kebijakan adalah budaya organisasi yang kurang mendukung peningkatan mutu. Budaya kerja yang masih bersifat tradisional, resistensi terhadap inovasi, serta kecenderungan mempertahankan praktik lama tanpa evaluasi dapat menghambat penerapan kebijakan baru. Padahal, lembaga dengan budaya organisasi yang kuat dan terbuka terhadap perubahan cenderung memiliki komitmen lebih tinggi terhadap tujuan kelembagaan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan Islam untuk

membangun budaya organisasi yang mendorong pembelajaran berkelanjutan dan inovasi manajerial.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di banyak lembaga pendidikan Islam. Sistem mutu yang belum berjalan dengan baik umumnya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman tentang konsep mutu, serta kurangnya komitmen dari seluruh pihak terkait. Ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi mutu menyebabkan kebijakan kelembagaan belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Literatur menekankan bahwa penguatan SPMI harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur lembaga.

Tantangan internal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan strategis di banyak lembaga pendidikan Islam masih belum terintegrasi dengan kebutuhan operasional yang nyata. Sebagian lembaga belum memiliki visi dan misi yang jelas disertai target kinerja yang terukur, sehingga kebijakan yang dirumuskan tidak dilaksanakan secara konsisten. Tanpa perencanaan strategis yang matang, upaya peningkatan mutu dan implementasi kebijakan kelembagaan berpotensi berjalan stagnan dan kurang responsif terhadap perkembangan lingkungan pendidikan.

Secara keseluruhan, tantangan internal dalam pelaksanaan kebijakan kelembagaan pendidikan Islam bersifat kompleks dan saling berkaitan, meliputi aspek SDM, manajemen, kepemimpinan, budaya organisasi, serta sistem penjaminan mutu. Berbagai kajian menegaskan bahwa solusi terhadap permasalahan tersebut memerlukan kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan, seperti peningkatan kompetensi manajerial, pelatihan kepemimpinan, dan pengembangan budaya organisasi yang mendukung mutu pendidikan. Upaya ini menjadi bagian penting dari strategi kebijakan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam jangka panjang.

Integrasi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional merupakan arah kebijakan penting yang semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pendidikan Islam kini dipandang sebagai bagian utama dari pembangunan pendidikan nasional, bukan sekadar alternatif di luar sistem. Proses integrasi ini diwujudkan melalui pengakuan resmi terhadap lembaga pendidikan Islam, penyesuaian kebijakan kurikulum, serta penerapan standar pendidikan nasional. Melalui kebijakan tersebut, pendidikan Islam memperoleh kedudukan yang lebih kuat dalam struktur pendidikan nasional sekaligus peluang yang lebih luas untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Penyelarasan kurikulum menjadi salah satu aspek sentral dalam integrasi pendidikan Islam. Kurikulum di lembaga pendidikan Islam diarahkan agar sejalan dengan kerangka kurikulum nasional tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khasnya. Kebijakan ini bertujuan agar lulusan pendidikan Islam memiliki kemampuan akademik, spiritual, dan sosial yang setara dengan lulusan lembaga pendidikan umum. Selain itu, integrasi kurikulum mendorong pendidikan Islam agar lebih responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat modern. (Tasrim, 2023)

Integrasi pendidikan Islam juga tercermin dalam penerapan sistem evaluasi dan penilaian yang mengacu pada standar nasional. Sistem ini meliputi penilaian hasil

belajar peserta didik, proses akreditasi lembaga, serta sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Penerapan standar evaluasi nasional dinilai mampu menjamin mutu pendidikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam. Dengan demikian, integrasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas dan akuntabilitas pendidikan Islam.

Selain itu, integrasi kelembagaan membuka peluang yang lebih besar bagi lembaga pendidikan Islam untuk memperoleh dukungan dari pemerintah. Dukungan tersebut dapat berupa pendanaan, bantuan sarana dan prasarana, serta program peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa semakin kuat posisi pendidikan Islam dalam sistem nasional, semakin besar pula akses lembaga pendidikan Islam terhadap berbagai program penguatan mutu. Dukungan ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan lembaga pendidikan Islam.

Meskipun demikian, proses integrasi juga menuntut kesiapan kelembagaan yang memadai. Berbagai literatur mencatat bahwa masih banyak lembaga pendidikan Islam yang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, sistem manajemen, dan fasilitas pendukung. Kondisi ini menyebabkan sebagian lembaga mengalami kesulitan dalam memenuhi standar nasional secara konsisten. Ketidaksiapan tersebut berpotensi menimbulkan beban administratif dan mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan integrasi, sehingga perlu diimbangi dengan kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.

Aspek budaya dan karakter keislaman juga menjadi perhatian penting dalam proses integrasi. Penerapan standar nasional yang terlalu kaku dikhawatirkan dapat mengurangi kekhasan pendidikan Islam, khususnya pada pesantren dan madrasah yang memiliki tradisi dan nilai yang telah mengakar. Integrasi yang tidak mempertimbangkan konteks kultural berpotensi menimbulkan resistensi internal dan melemahkan identitas keislaman lembaga. Oleh karena itu, kebijakan integrasi perlu dirancang secara fleksibel dan kontekstual agar nilai-nilai keislaman tetap terpelihara.

Secara umum, literatur menegaskan bahwa integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional harus dilaksanakan secara seimbang antara tuntutan standarisasi dan pelestarian karakter keislaman. Kebijakan integrasi yang proporsional akan memperkuat posisi pendidikan Islam dalam sistem nasional tanpa menghilangkan identitasnya. Dengan pendekatan yang kontekstual dan berorientasi pada penguatan kelembagaan, integrasi pendidikan Islam diharapkan mampu meningkatkan mutu, relevansi, dan kontribusinya terhadap pembangunan pendidikan nasional secara berkelanjutan.

Implikasi Kebijakan terhadap Penguatan Kelembagaan Pendidikan Islam

Kebijakan kelembagaan pendidikan Islam memiliki dampak penting terhadap peningkatan mutu dan keberlanjutan lembaga. Kajian literatur menunjukkan bahwa kebijakan yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan nyata lembaga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan, kualitas pembelajaran, serta profesionalisme tenaga pendidik. Dukungan regulasi formal memberikan kerangka hukum yang jelas, sehingga lembaga pendidikan Islam memperoleh legitimasi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan lebih pasti.

Selain itu, kebijakan yang berbasis pada kebutuhan internal lembaga juga mendorong penguatan identitas keislaman. Penguatan ini tidak terbatas pada nilai-nilai agama, tetapi mencakup etika, budaya kerja, dan karakter khas lembaga. Kebijakan yang mengombinasikan standar nasional dengan nilai keislaman memastikan bahwa integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem nasional tetap mempertahankan ciri khas lembaga. (Umam, 2021)

Kebijakan kelembagaan juga berdampak pada kepercayaan masyarakat dan partisipasi pemangku kepentingan. Literatur menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas lembaga meningkatkan dukungan publik, baik melalui keterlibatan aktif maupun pendanaan. Tingkat kepercayaan masyarakat menjadi modal penting bagi keberlanjutan lembaga dan pengembangan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan lokal maupun nasional. (Indana et al., 2024)

Selain itu, kebijakan kelembagaan berperan dalam memperkuat kapasitas internal lembaga. Peningkatan kompetensi manajerial, pelatihan kepemimpinan, dan pengembangan SDM secara berkelanjutan membuat lembaga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi, menerapkan sistem manajemen mutu, serta menghadapi tantangan eksternal secara efektif.

Penguatan kelembagaan melalui kebijakan juga memperkuat sistem penjaminan mutu dan akuntabilitas. Literatur menunjukkan bahwa kebijakan yang menekankan pemantauan, evaluasi, dan standar kinerja mendorong lembaga untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan. Penerapan sistem ini menjamin bahwa setiap program pendidikan sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan peserta didik, sehingga kualitas lembaga meningkat secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, kebijakan yang efektif mendorong lembaga pendidikan Islam untuk lebih adaptif terhadap tantangan eksternal, termasuk perkembangan teknologi, globalisasi, dan tuntutan sosial. Lembaga yang responsif mampu merancang strategi pembelajaran inovatif, meningkatkan relevansi pendidikan, serta memperkuat daya saing lulusan. Kebijakan yang fleksibel dan kontekstual menjadi instrumen strategis dalam menghadapi dinamika lingkungan pendidikan.

Secara keseluruhan, literatur menekankan bahwa pengembangan kebijakan kelembagaan pendidikan Islam harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kebijakan perlu responsif terhadap kebutuhan internal lembaga, sekaligus mampu menghadapi tantangan eksternal dan memperkuat kapasitas kelembagaan. Dengan implementasi yang konsisten, kebijakan kelembagaan dapat menjadi alat strategis untuk memperkuat peran pendidikan Islam sebagai bagian integral dari pembangunan pendidikan nasional.

SIMPULAN

Sebagai kesimpulan, Berdasarkan kajian literatur, pengembangan kebijakan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia merupakan proses yang bersifat kompleks dan dinamis. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk regulasi pemerintah, tantangan internal lembaga, dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan kelembagaan tidak hanya berperan sebagai instrumen administratif, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan, akuntabilitas, serta daya saing lembaga pendidikan Islam. Selain itu, integrasi lembaga pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional menuntut keseimbangan antara pemenuhan standar nasional dan pelestarian identitas keislaman lembaga.

Pengembangan kebijakan yang responsif dan berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan menjadi faktor kunci kesuksesan pendidikan Islam di era modern. Literatur menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, memperkuat manajemen internal, serta memanfaatkan peluang dari regulasi dan teknologi, cenderung lebih berkelanjutan dan memiliki daya saing tinggi. Dengan demikian, kebijakan kelembagaan yang dirancang secara komprehensif dan kontekstual dapat meningkatkan peran pendidikan Islam dalam membangun sumber daya manusia yang unggul serta mendukung pembangunan pendidikan nasional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Aziz, A. A., & Marlina, Y. (2025). *Enhancing Educational Quality Through Strategic Human Resource Management in Islamic Schools*. 09(02), 694–707.
- Bakar, M. Y. A., Firmansyah, E., & Abdeljelil, M. Ben. (2024). *Legal Framework Analysis of Islamic Religious Education Policy Implementation*. 3(3), 217–237.
- Darwinsyah, M., & Nugroho, R. (2021). *Jalan panjang regulasi pendidikan islam di indonesia*. 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.6.1.1-10>
- Fadilah, L. R., Zahra, S., Alawiyah, S. M., & Syarifuddin, E. (2023). *IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM*. 4(2), 52–53.
- Indana, N., Mustofa, A., Aziz, A., Qomar, M., & Junaris, I. (2024). *Government Policy in Strengthening Education Quality Assurance in Islamic Education Institutions*. 16(1), 393–406. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v16i1.3245>
- Roqib, M. (2025). *International Journal of Social Science and Human Research Islamic Education in Indonesian Legal Framework : Policy Analysis and Implementation*. 08(07), 5474–5478. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i7-67>
- Rusdiana, A. (n.d.). *AKUNTABILITAS PERGURUAN TINGGI ISLAM SWASTA*. 25.
- Saimima, M. S., & Banawi, A. (2023). *Implementasi Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam (Analisis Menggunakan Systematic Literature Review)*. 8(1), 47–65.
- Syadzily, T. A. H. (2025). *An Examination of Pesantren Regulatory Policy within the Framework of National Resilience*. 13(2), 169–182. <https://doi.org/10.55960/jlri.v13i2.1099>
- Tasrim, I. W. (2023). *Effectiveness, Challenges, and Implications of Internal Quality Assurance System Implementation Before and After Covid-19 Pandemic*. 8(2).
- Umam, K. (2021). *PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI PERGURUAN TINGGI ISLAM SINKRONISASI DENGAN KEBIJAKAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA*. 631–650. <https://doi.org/10.30868/ei.v10i01.1467>